



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AULIA RIFAI**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN HUKUM PERDATA**
3. NHK : **816462**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 19.027.100.000**

1. Tanah Seluas 1.646 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI
Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/226 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , Rp. 2.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , Rp. 3.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/323 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.975.000.000
5. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 416 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , Rp. 2.100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/125 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.742.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.167.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
325.000.000



2. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOBIL, CHERY TIGGO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 282.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 497.142.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 7.579.115.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.939.836.887

F. HARTA LAINNYA Rp. 498.000.000

Sub Total Rp. 33.708.193.887

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 33.708.193.887

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.